



Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**

TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Tugas dan Fungsi	6
2.2. Sumberdaya OPD	7
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..	9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	11
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	11
3.3. Telaahan RENSTRA Kementrian / Lembaga dan Renstra	12
3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS	15
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	19
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	22
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	23
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	43



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia, taufik dan hidayahNya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat menyusun dan menyelesaikan Renstra tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra ini merupakan kewajiban setiap OPD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam penyajian Renstra ini tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan bidang-bidang teknis yang ada. Renstra ini merupakan acuan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya.

Dengan disusunnya Renstra ini harapan kami kritik ataupun saran merupakan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Samarinda, Juni 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,

SUCIPTO, S.Pd,M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2026.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi dan strategi untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra OPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.



3. Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang orang/lembaga asing yang ada di Indonesia
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD,



Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.
16. Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
20. Peraturan Daerah No 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.



23. Peraturan Walikota No 37 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2021
24. Peraturan Walikota No 27 tgl 7 Juli 2021 tentang RKPD Kota Samarinda tahun 2022

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perencanaan Strategik (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pencapaian arah serta kebijakan lainnya serta tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
2. Tersusunnya sasaran dan program yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan serta pelaksanaan tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk lima tahun mendatang.
3. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri enam bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, serta penentuan isu-isu strategis dari tiap bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung RPJMD Kota Samarinda.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Gambaran Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala



Daerah dan Legislatif.

- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

2.2. Sumber Daya OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2020, memiliki jumlah pegawai sebanyak 81 orang, yang terdiri dari 48 orang PNS, 13 orang PTTB, dan 20 orang PTTH. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	CPNS	PTTB	PTTH	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	-	1	1
3.	SLTA	19	-	9	14	42	42
4.	D.I	-	-	-	-	-	0
5.	D.II	-	-	-	-	-	0
6.	D.III	3	-	-	-	3	3
7.	Sarjana (S1)	15	-	4	6	25	25
8.	Pasca Sarjana (S2)	10	-	-	-	10	10
	Jumlah	48	-	13	20	81	81

Sumber data : Kepegawaian

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	1	1
2.	II	20	20
3.	III	19	19
4.	IV	8	8
	Jumlah	48	48

Sumber data : Kepegawaian



3. Tenaga PTTH

No	Penempatan Kerja	Jumlah (orang)
1.	➤ FKUB	1
2.	➤ PANWAS	0

Sumber data : Kepegawaian

4. Pembagian tugas

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda membagi tugasnya kepada stafnya yang terdiri dari:

1. Kepala Badan (Kaban) : 1 orang
 2. Sekretaris : 1 orang
 3. Kepala Bidang (Kabid) : 4 orang
 4. Kepala Sub Bagian (Kasubbag) : 3 orang
 5. Kepala Sub Bidang (Kasubbid) : 8 orang
 6. Staf PNS : 33 orang
 7. PTTB : 13 orang
 8. PTTH : 20 orang
- JUMLAH : 83 orang**

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kinerja pelayanan OPD, hasil yang dicapai pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Termonitornya kasus unjuk rasa dan kerawanan konflik sosial masyarakat.
2. Tersedianya data / peta potensi rawan konflik di masyarakat.
3. Terkoordinasinya instansi terkait dengan pihak keamanan.
4. Tersedianya data perkembangan politik daerah.



Sedangkan realisasi program dan kegiatan yang dicapai pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2020 pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada kegiatan Keamanan dan Ketertiban Nasional Kota Samarinda dan Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda dapat dicapai 68,82%.
2. Untuk tahun 2020 pencapaian kinerja pada program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada kegiatan Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pemantapan Wawasan Kebangsaan & Pembauran Kebangsaan, Keg. Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture Masyarakat, Keg. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dlm Kehidupan Beragama Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dapat dicapai 88,44%.
3. Untuk tahun 2020 pencapaian kinerja pada program Pendidikan Politik Masyarakat pada kegiatan Keg. Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat, Keg. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda dan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicapai 42,29%.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Yang menjadi tantangan baik internal (dalam) dan eksternal (luar) serta peluang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda dapat kita lihat dan rasakan masih banyak terjadi konflik di masyarakat baik dikalangan bawah maupun atas dengan latar belakang permasalahan yang bermacam-macam.

Adapun tantangan (internal) diantaranya:



1. Tenaga aparatur/SDM yang masih kurang memadai.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat terbatas.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) dan terjadinya mutasi aparatur dapat menghambat proses kerja.
5. Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan menjadi instansi vertikal juga dapat menghambat proses penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa.

Sedangkan tantangan eksternal diantaranya :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih rendah.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Adapun peluang atau solusi yang didapat sebagai berikut :

1. Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dukungan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ORMAS, OKP, LSM serta mahasiswa dan pelajar dalam pelaksanaan pembinaan dibidang kesbangpol.
3. Adanya keterkaitan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021 – 2026.
4. Terbentuknya Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan konflik sosial di masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yaitu :

1. Masih Kurangnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, anti sipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”.

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Berdasarkan Misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengemban Misi ke 3 (tiga) yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”*** serta



mendukung terwujudnya Misi yang ke 5 (lima) yaitu “***Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari***”

Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program *smart city* plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*star up*)

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas akan didukung oleh program yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra

Analisis Rencana Kerja Kementrian / Lembaga dan OPD Pemerintah Kota yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja OPD Pemerintah Kota terhadap sasaran Rencana Kerja Kementrian / Lembaga dan OPD Pemerintah Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing– masing OPD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri



sedangkan OPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Ekonomi.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
4. Politik.
5. Pertahanan dan Keamanan.
6. Hukum dan Aparatur.
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah telah menyusun RPJMN 2019-2024 dengan mengangkat Visi ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;



7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sedangkan 5 prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. Peningkatan Infrastruktur strategis;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Sedangkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Ada 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RT/RW dan KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian.

Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 872.768 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2019 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023, membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

**Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033**

No	Kecamatan	Jumlah 2013	Rencana Distribusi Penduduk	
			2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	111.34.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
Jumlah		805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah Kota Samarinda yang ada pada program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik

Terkait isu strategis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan ekosistem yang ada di sungai Mahakam seperti berkurangnya jumlah ikan pesut khas Samarinda.
2. Rusaknya kawasan hutan akibat penebangan liar dan penambangan batu bara.
3. Bencana banjir, tanah longsor, kemarau yang cukup meningkat.
4. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri ataupun limbah rumah tangga.
5. Minimnya Ruang Tata Terbuka Hijau (RTH)



Untuk mengantisipasi dampak KLHS tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Maraknya paham/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas

Tabel 35

Permasalahan Pelayanan Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Meningkatnya kerawanan-kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas daerah	Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk Kota Samarinda	Masih rendahnya tingkat pendapatan
2	Kurangnya koordinasi antara Pemkot dan instansi vertikal dalam menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan di Kota Samarinda		
3.	Rendahnya kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta sejarah kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Kemajuan tehnologi yg sangat mempengaruhi sikap-sikap kepribadian kepada masyarakat	Kemajemukan masyarakat yang ada dengan latar belakang berbeda-beda
	Pembinaan terhadap kerukunan umat beragama masih kurang optimal akibat luasnya lingkup geografis		
4.	Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan masih terasa kurang mengingat semakin bertambahnya ormas yang ada dari tahun ke tahun		
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya tradisional		
5.	Masih kurangnya koordinasi antar instansi penyelenggara Pemilu dan Pemkot dalam penyelenggaraan dan kelancaran Pemilu	Perbedaan pendapat tentang peraturan/perundang-undangan yang dibuat pemerintah pusat.	Kewenangan pemerintah pusat tidak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah
	Masih kurangnya dukungan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemilu di daerah		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat

4.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD

4.3. Indikator Sasaran

Sedangkan Indikator Sasaran dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat
2. Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik
3. Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan



4. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan
5. Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti
6. Nilai IKM

Berikut Tujuan dan Sasaran ada pada Tabel 25

TABEL. 25
TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	9.33	20.83	25	29,17	33,33	41,67
			Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	4	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	18.29	13.41	14,63	15,85	17,07	20,73
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	6.45	30	35	40	45	45
			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	7.34	20	20	20	20	20
			Nilai Lakip	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam tahun 2021 – 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki Wawasan dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

5.2. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021 – 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Revolusi mental
2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2021-2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai berikut :

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Subkeg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



- Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pembuatan web site Kesbangpol Kota Samarinda
- Subkeg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Subkeg. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang /Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
 - Subkeg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
 - Subkeg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Samarinda, pada tahun anggaran 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah menyusun anggaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.2.
Pendanaan Indikatif Program/kegiatan Badan Kesbangpol Kota Samarinda
untuk Tahun 2021 - 2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	%	20.83	300,000,000	20.83	309,000,000	25.00	318,270,000	29.17	609,720,448	33.33	327,818,100	41.67	337,652,643
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	500	300,000,000	500	309,000,000	700	318,270,000	1000	609,720,448	1200	327,818,100	1500	337,652,643
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	3	100,000,000	3	103,000,000	3	106,090,000	3	397,540,448	3	109,272,700	3	112,550,881
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	3	200,000,000	3	200,000,000	3	206,000,000	3	212,180,000	3	218,545,400	3	225,101,762

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	%	100%	2,298,645,335	100%	2,298,645,335	100%	2,367,604,695	100%	2,438,632,836	100%	2,511,791,821	100%	2,587,145,576
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Orang	1100	2,298,645,335	1100	2,298,645,335	3800	2,367,604,695	1000	2,438,632,836.	1200	2,511,791,821	1200	2,587,145,576
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	12	2,198,645,335	12	2,198,645,335	12	2,264,604,695	12	2,332,542,836	12	2,402,519,121	12	2,474,594,695

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	12	100,000,000	12	100,000,000	12	103,000,000	12	106,090,000	12	109,272,700	12	112,550,881
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	%	13.41	80,000,000	13.41	80,000,000	14.63	82,400,000	15.85	84,872,000	17.07	87,418,160	20.73	90,040,704
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	Ormas	11	80,000,000	11	80,000,000	12	82,400,000	13	84,872,000	14	87,418,160	17	90,040,704
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas	10	40,000,000	20	40,000,000	20	41,200,000	25	42,436,000	28	43,709,080	31	45,020,352

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas	10	40,000,000	20	40,000,000	20	41,200,000	25	42,436,000	28	43,709,080	31	45,020,352
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	%	6,45	450,000,000	30	450,000,000	35	463,500,000	40	477,405,000	45	491,727,150	45	506,478,964
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	30	450,000,000	30	450,000,000	35	463,500,000	40	477,405,000	45	491,727,150	45	506,478,964
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	5	225,000,000	3	225,000,000	3	231,750,000	3	238,702,500	3	245,863,575	3	253,239,482

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	5	225,000,000	3	225,000,000	3	231,750,000	3	238,702,500	3	245,863,575	3	253,239,482
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	%	20	724,720,000	20	724,720,000	20	746,461,600	20	768,855,448	20	791,921,111	20	815,678,745
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	kasus	20	724,720,000.00	24	724,720,000.00	24	746,461,600.00	24	768,855,448	24	791,921,111	24	815,678,745
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dok.laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	4	250,000,000	4	250,000,000	4	257,500,000	4	265,225,000	4	273,181,750	4	281,377,203

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	5	100,000,000	4	100,000,000	4	103,000,000	4	106,090,000	4	109,272,700	4	112,550,881
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat	10 kali	374,720,000	10kali	374,720,000	10 kali	385,961,600	10 kali	397,540,448	10 kali	409,466,661	10 kali	421,750,661
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM		76,4	13,000,000,000	76,5	13,000,000,000	76,6	14,943,184,000	76,7	14,134,396,700	76,8	14,020,674,880	76,9	14,130,674,880
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip		80,1	100,000,000	80,2	100,000,000	80,3	103,000,000	80,4	106,090,000	80,5	109,272,700	80,6	112,550,880
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	Dokumen	5	100,000,000	1	100,000,000	1	103,000,000	1	106,090,000	1	109,272,700	1	112,550,880
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		-	11,050,000,000	-	11,050,000,000	-	11,150,000,000	-	11,250,000,000	-	11,350,000,000	-	11,450,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	65	10,000,000,000	65	10,000,000,000	65	10,000,000,000	65	10,000,000,000	65	10,000,000,000	65	10,000,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	40	1,000,000,000	40	1,000,000,000	40	1,100,000,000	40	1,200,000,000	40	1,300,000,000	40	1,400,000,000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	105	210,000,000	105	210,000,000	105	220,000,000	105	240,000,000	105	250,000,000	105	260,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Stel	80	50,000,000	90	50,000,000	90	50,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	Orang	20	160,000,000	-	0	20	160,000,000	20	170,000,000	20	180,000,000	20	190,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	12	387,500,000	12	387,500,000	12	387,500,000	12	495,000,000	12	495,000,000	12	495,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	12	7,500,000	12	7,500,000	12	7,500,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	dokumen	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah SPPD	SPPD	12	200,000,000	12	200,000,000	20	200,000,000	25	250,000,000	30	250,000,000	35	250,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	-	0	-	0	5	586,874,000	3	405,124,000	2	63,124,000	2	63,124,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	Unit	-	0	-	0	3	586,874,000	2	63,124,000	2	63,124,000	2	63,124,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	-	0	-	0	2	985,220,000	1	342,000,000	-	0	-	0

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	1,285,000,000	12	1,285,000,000	12	1,385,000,000	12	1,500,000,000	12	1,600,000,000	12	1,600,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diantar	surat	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	bukti pembayaran	36	45,000,000	36	45,000,000	36	45,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bukti pembayaran	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	12	1,300,000,000	12	1,400,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	bukti pembayaran	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	12	127,500,000	12	127,500,000	12	132,500,000	12	145,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Unit	18	60,000,000	18	60,000,000	18	65,000,000	18	65,000,000	18	70,000,000	18	70,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin	Unit	12	7,500,000	12	7,500,000	12	7,500,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung	Gedung	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Tabel 7.
KINERJA PELAYANAN OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SAMARINDA 2021-2026

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Capaian SKPD					SKPD
					2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Orang	700	900	1100	1300	1500	1700	Badan KesbangPol
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	0	0	12	15	5	5	Badan KesbangPol
		Jumlah TIM Monitoring Perkembangan Politik Daerah	Orang	81	81	81	81	81	81	Badan KesbangPol
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Anggota ORMAS	Orang	100	200	300	400	500	600	Badan KesbangPol
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	Badan KesbangPol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik sosial di masyarakat	Kasus	-	-	-	50	45	40	Badan KesbangPol

[illegible][illegible]

[illegible]

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kineerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	500 Orang	700 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1500 Orang	4,900 orang
26.	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15 dokumen
27.	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen
28.	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	-	-	1100 Orang	3800 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1200 Orang	8,300 orang

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kineerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	60 Dokumen
30.	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	60 Dokumen
31.	Jumlah Ormas yang dibina	15 Ormas	11 Ormas	12 Ormas	13 Ormas	14 Ormas	15 Ormas	17 Ormas	67 Ormas
	Jumlah jenis laporan dokumen Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	20 dokumen	20 Dokumen	25 Dokumen	28 Dokumen	31 Dokumen	124 Dokumen

BAB VIII

PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2021-2026. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

SUCIPTO, S.Pd,M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003